

JEJAK AKUNTANSI DI PULAU JAWA: HISTORIOGRAFI MASA KEJAYAAN KERAJAAN MATARAM KUNO DAN KERAJAAN MATARAM ISLAM

Oleh:

Diska Arliena Hafni¹

Universitas Aisyiyah Yogyakarta

Alamat: JL. Siliwangi No.63, Area Sawah, Nogotirto, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (55292).

Korespondensi Penulis: diskaarliena@unisayoga.ac.id.

Abstract. This study examines the history of accounting during the heyday of the Mataram Kuno and Mataram Islam kingdoms. It is a qualitative historiography study. The methods used are historical research with an epigraphic approach and a literature study. The results show that both kingdoms experienced their peak of glory, reflected in their economic, social, and political power. The agricultural sector was the mainstay of both kingdoms' economies, with rice as the main commodity. In fact, during the Islamic kingdom period, the region was the largest exporter of rice. The royal government taxed traded commodities. During the Mataram Kuno kingdom, land and crop taxes were imposed, and people also had to pay taxes on trade and crafts. Trade taxes were collected by government officials in charge of taxation, known as 'rama'. In the Mataram Islam Kingdom, tax management was carried out by organizing a tax administration bureaucracy based on a regional system that determined the types and amounts of taxes that had to be paid to the kingdom. During the Mataram Islam Kingdom, taxes were imposed on the population, agriculture, land, and goods and services. Royal financial institutions, namely 'wedana gedung kiwa' and 'wedana gedung tengen', were also established during this period to manage royal revenue.

Keywords: Accounting History, Historiography, Mataram Kuno Kingdom, Mataram Islam Kingdom.

Received January 07, 2026; Revised January 20, 2026; February 07, 2026

*Corresponding author: diskaarliena@unisayoga.ac.id

JEJAK AKUNTANSI DI PULAU JAWA: HISTORIOGRAFI MASA KEJAYAAN KERAJAAN MATARAM KUNO DAN KERAJAAN MATARAM ISLAM

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejarah akuntansi pada masa kejayaan Kerajaan Mataram Kuno dan Kerajaan Mataram Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif jenis historiografi. Metode yang digunakan adalah penelitian historis dengan pendekatan epigrafi dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Kerajaan Mataram Kuno maupun Kerajaan Mataram Islam sama-sama pernah mengalami puncak kejayaan, yang mana kejayaannya juga tercermin dalam kekuatan ekonomi, sosial dan politik dari kedua kerajaan tersebut. Sektor pertanian menjadi penyokong utama perekonomian kedua kerajaan tersebut dengan komoditas utama padi/beras. Bahkan pada masa Kerajaan Islam pernah menjadi daerah pengekspor beras paling besar saat itu. Komoditas yang diperdagangkan dikenai pajak oleh pemerintah kerajaan. Pada masa Kerajaan Mataram Kuno sudah diterapkan pajak hasil bumi dan pajak tanah, selain itu rakyat pun harus membayar pajak perdagangan dan pajak usaha kerajinan. Pajak perdagangan dipungut oleh pejabat pemerintah yang bertugas mengurusi pajak yang disebut *rama*. Pengelolaan pajak di Kerajaan Mataram Islam dengan cara mengatur birokrasi kepengurusan pajak yang didasarkan pada sistem perwilayahannya dan menentukan jenis dan besaran pajak yang harus diserahkan kepada Kerajaan. Pajak yang diberlakukan pada masa Kerajaan Mataram Islam seperti pajak penduduk, pajak hasil bumi, pajak tanah, pajak upeti, dan pajak bea cukai barang dan jasa. Pada masa Kerajaan Mataram Islam juga sudah dibentuk lembaga keuangan kerajaan, yaitu *wedana gedung kiwa* dan *wedana gedung tengen* untuk mengurusi pemasukan kerajaan.

Kata Kunci: Sejarah Akuntansi, Historiografi, Kerajaan Mataram Kuno, Kerajaan Mataram Islam.

LATAR BELAKANG

Sejarah akuntansi tidak hanya mencakup catatan teknis dan angka, tetapi juga gagasan dan nilai-nilai yang membentuk perilaku dan keputusan organisasi serta individu. Carnegie (2014) menyatakan bahwa akuntansi, sebagai praktik sosial yang melibatkan pengukuran dan interpretasi, memiliki dampak yang signifikan pada fungsi organisasi dan perkembangan sosial. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk menggali

lebih dalam mengenai narasi tersebut melalui penelitian sejarah akuntansi. Penelitian sejarah akuntansi tidak hanya berfungsi untuk memahami masa lalu, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori akuntansi di masa depan. Napier (2022) menekankan bahwa pendekatan teoretis dalam penelitian sejarah dapat meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana berbagai faktor mampu berinteraksi dalam konteks akuntansi. Dengan menganalisis narasi sejarah, peneliti dapat mengidentifikasi pola dan hubungan yang relevan, serta mengembangkan konsep-konsep baru yang kritis bagi pengembangan praktik akuntansi. Pemahaman yang diperoleh dari analisis sejarah dapat membantu akuntan dan pengambil keputusan untuk beradaptasi terhadap tantangan baru yang muncul dalam lanskap bisnis yang kian kompleks.

Alferjani et al. (2018) melakukan penelitian tentang perkembangan institusi regulasi akuntansi di Libya sejak tahun 1951-2006. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor politik dan ideologi nasional memainkan peran penting dalam membentuk praktik akuntansi dan pengaturannya di negara tersebut. Penelitian ini memperlihatkan bagaimana interaksi dengan dunia eksternal yang sedang globalisasi dapat memengaruhi perkembangan akuntansi di sebuah negara yang memiliki sejarah kolonial. Oleh karena itu, hal ini memberikan wawasan kritis bagi penelitian sejarah akuntansi yang memerlukan perhatian terhadap konteks nasional dan internasional dalam pengembangan akuntansi. Carlo et al. (Carnegie & Napier, 2012) menekankan perlunya memahami akuntansi dalam konteks global dan regional yang lebih luas, dengan menekankan bahwa sejarah akuntansi berfungsi sebagai jembatan untuk memahami akuntansi kontemporer serta proyeksi ke depan.

Perkembangan penelitian sejarah akuntansi di Indonesia, menunjukkan evolusi penting dalam pemahaman akuntansi yang tidak hanya sebagai praktik bisnis tetapi juga sebagai bagian integral dari sejarah sosial dan budaya masyarakat. Penelitian Sejarah akuntansi dengan pendekatan *New Accounting History* menawarkan perspektif yang lebih luas dengan mengedepankan hubungan akuntansi dengan konteks historis dan kultural, serta bagaimana norma dan institusi sosial membentuk praktik akuntansi itu sendiri. Salah satu aspek yang relevan dalam perkembangan *New Accounting History* adalah penerapan metodologi historis yang mencakup pendekatan heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi dalam penelitian sejarah akuntansi Nawangsari & Hanun (2020). Melalui metodologi ini, para peneliti dapat menggali lebih dalam jejak sejarah akuntansi yang

JEJAK AKUNTANSI DI PULAU JAWA: HISTORIOGRAFI MASA KEJAYAAN KERAJAAN MATARAM KUNO DAN KERAJAAN MATARAM ISLAM

tidak hanya terkait dengan praktik akuntansi di masa lampau, tetapi juga berkaitan dengan dinamika sosial budaya yang terjadi pada saat itu. Penelitian seperti yang dilakukan oleh Nawangsari dan Hanun Nawangsari & Hanun (2020) menekankan pentingnya memahami akuntansi dalam konteks kerajaan Islam sebagai upaya untuk merekonstruksi perkembangan akuntansi Indonesia.

Penelitian tentang akuntansi pada masa lampau, seperti yang dibahas oleh Lutfillah (2014), menunjukkan bahwa praktik akuntansi dalam konteks kerajaan Jawa kuno memiliki tujuan sosial dan ritual yang penting. Penemuan ini mendemonstrasikan bahwa akuntansi bukan hanya sebuah teknik numerik, tetapi memiliki peran yang lebih kompleks dalam struktur sosial dan kekuasaan masyarakat. Oleh karena itu, dengan pendekatan *New Accounting History*, penelitian-penelitian semacam ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan dalam memahami bagaimana praktik akuntansi telah berkembang dan beradaptasi dalam konteks sosial yang berbeda. Penelitian sejarah akuntansi dengan pendekatan *New Accounting History* membuka peluang bagi pemahaman akuntansi yang lebih komprehensif. Dengan menggabungkan aspek sejarah, budaya, serta dinamika sosial, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan pengetahuan akademis dan aplikasi praktis di masa depan.

Historiografi adalah studi tentang cara penulisan sejarah, termasuk metode, teknik, dan pendekatan yang digunakan sejarawan dalam merekonstruksi masa lalu. Historiografi akuntansi di Indonesia dapat dilihat pada penelitian tentang sejarah akuntansi masa kejayaan Kerajaan Singosari (1222-1292), yang menggambarkan bentuk dan peranan akuntansi masa lalu, diskripsi kandungan kehidupan sosial budaya masyarakat, peran pasar, pemakaian huruf, bahasa, angka dan perhitungan mekanisme pajak (Sukoharsono dan Lutfillah 2008). Pemaknaan terhadap praktik akuntansi yang terjadi di Indonesia juga dapat ditelusuri pada penelitian sejarah akuntansi pada masa pemerintahan Raja Udayana Bali (989-1011 Masehi), dimana akuntansi direfleksikan sebagai kontruksi Akuntansi Ibu, yang memiliki keterkaitan terhadap 5 konsep praktik akuntansi, yaitu akuntansi air, akuntansi feminin, akuntansi spiritual, akuntansi lokalitas dan akuntansi pertanian (Budiasih *et al.* 2012).

Kerajaan Mataram merupakan salah satu kerajaan terbesar di pulau Jawa. Kerajaan ini memiliki dua periode penting, yaitu Mataram Kuno (Hindu-Budha) dan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Kuno mencapai kejayaannya pada masa pemerintahan Dinasti Syailendra, khususnya pada masa pemerintahan Sri Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitung. Pada masa ini, kerajaan mengalami perkembangan pesat di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008).

Kerajaan Mataram Islam mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakrakusuma (1613-1645). Di bawah kepemimpinan Sultan Agung, Mataram berhasil memperluas wilayah kekuasaannya ke seluruh Jawa (kecuali Banten dan Batavia), sebagian Blambangan, dan seluruh Pulau Madura. Selain itu, Sultan Agung juga dikenal sebagai raja yang memajukan bidang kebudayaan, seni, dan ekonomi, serta mengembangkan penanggalan Jawa yang menggabungkan perhitungan Islam dan Hindu. Penelitian sejarah akuntansi memegang peranan yang krusial untuk memahami dinamika yang mengatur sistem akuntansi di berbagai konteks, dengan mempertimbangkan pengaruh faktor historis, sosial, dan budaya. Dengan demikian, studi yang mendalam tentang sejarah akuntansi bukanlah sekadar penggalian data masa lalu, tetapi merupakan langkah strategis untuk merumuskan teori dan praktik akuntansi yang lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan masa depan. Berdasarkan argumen-argumen di atas, peneliti melakukan penelitian tentang Jejak Akuntansi di Pulau Jawa mulai Masa Kejayaan Kerajaan Mataram Kuno hingga Kerajaan Mataram Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan historiografi. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini ialah historis dengan pendekatan epigrafi. Tahapan penelitian historis menurut Kuntowijoyo (2013) terdiri atas lima tahapan yaitu, 1) pemilihan topik, 2) pengumpulan sumber, 3) verifikasi (kritik sumber), 4) interpretasi (analisis dan sintesis), 5) historiografi (penulisan sejarah). Metode epigrafi digunakan karena penelitian ini menggunakan data prasasti atau data-data peninggalan sejarah yang telah dialih aksara dan dialih bahasakan oleh peneliti terdahulu. Menurut Sjamsuddin (2007) epigrafi ialah pengetahuan mengenai cara membaca, menentukan tanggal atau waktu, dan menganalisis tulisan atau inskripsi kuno. Inskripsi atau prasasti

JEJAK AKUNTANSI DI PULAU JAWA: HISTORIOGRAFI MASA KEJAYAAN KERAJAAN MATARAM KUNO DAN KERAJAAN MATARAM ISLAM

itu dimaksudkan untuk memberikan informasi, atau catatan mengenai kejadian-kejadian penting. Penelitian ini memanfaatkan data pustaka dan studi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Kerajaan Mataram

Kerajaan Mataram merujuk pada dua entitas kerajaan berbeda yang pernah ada di Jawa, yaitu Kerajaan Mataram Kuno dan Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Kuno (abad ke-8 hingga ke-11 M) didirikan pada tahun 732 M oleh Raja Sanjaya dari Dinasti Sanjaya. Kerajaan Mataram Kuno awalnya berpusat di wilayah Mataram, sekarang disebut dengan Daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya di Jawa Tengah. Kerajaan Mataram Kuno bercorak Hindu-Buddha. Selain Dinasti Sanjaya, kerajaan ini juga diperintah oleh Dinasti Syailendra (di Jawa Tengah) dan Dinasti Isyana (di Jawa Timur). Peninggalan bersejarah Kerajaan Mataram Kuno antara lain Prasasti Canggal, Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan berbagai peninggalan lainnya. Kerajaan Mataram Kuno mengalami perkembangan pesat dalam bidang pertanian, terutama dengan sistem irigasi yang canggih di dataran tinggi Dieng.

Kerajaan Mataram Islam (abad ke-16 hingga ke-18 M) didirikan oleh Panembahan Senopati (Danang Sutawijaya) pada tahun 1586, dengan pusat pemerintahan di Kotagede, Yogyakarta. Awalnya merupakan pemberian tanah dari Sultan Hadiwijaya (Joko Tingkir) kepada Ki Ageng Pemanahan, yang kemudian dilanjutkan oleh putranya, Sutawijaya. Kerajaan Mataram Islam berpusat di Kotagede, Yogyakarta, dan kemudian berkembang menjadi kerajaan besar. Masa Kejayaan Kerajaan Mataram Islam pada masa pemerintahan Sultan Agung (1613-1645), yang dikenal sebagai raja yang berani dan berhasil mengembangkan budaya Islam di kerajaannya. Kerajaan ini akhirnya terpecah akibat pengaruh Belanda dan Perjanjian Giyanti pada tahun 1755.

Jejak Akuntansi Era Kejayaan Kerajaan Mataram Kuno (VII- XI Masehi)

Data mengenai kehidupan perekonomian pada masa Kerajaan Mataram Kuno diperoleh berdasarkan prasasti. Menurut Susanti (2010) secara tersirat isi prasasti Jawa Kuno umumnya menyebutkan daftar para pelaku ekonomi, aktivitas ekonomi, dan sarana

perekonomian. Para pelaku ekonomi adalah para pedagang dan petugas yang terlibat dalam urusan dagang, para pemungut pajak, pekerja seni, dan pengrajin, petani, petugas perkebunan serta peternak. Pembahasan mengenai kehidupan ekonomi terdiri atas pertanian, perdagangan, kerajinan, dan kesenian. Berikut ialah penjelasan kehidupan ekonomi masyarakat.

Sektor pertanian menempati kedudukan utama dalam bidang perekonomian, bahkan merupakan tulang punggung bagi kehidupan masyarakat dan kehidupan negara pada umumnya. Prasasti Canggal memberikan ilustrasi bahwa Pulau Jawa ialah pulau yang menghasilkan beras (Oemar, dkk., 1994). Prasasti Canggal tersebut merupakan peninggalan Kerajaan Mataram Kuno. Masyarakat Kerajaan Mataram Kuno bermata pencaharian di bidang pertanian. Aktivitas perdagangan sudah dilakukan pada masa Jawa Kuno. Pedagang dalam masyarakat Jawa Kuno dikenal dengan istilah *abakul*, sedangkan aktivitas perdagangan dikenal dengan istilah *adagaj* (Zoetmulder, 1994). Berdasarkan prasasti yang ditemukan di sekitar Candi Borobudur tidak ada yang menyebutkan aktivitas perdagangan. Tetapi temuan prasasti Kerajaan Mataram Kuno dari tempat lain ada yang menyebutkan aktivitas perdagangan, yaitu Prasasti Panggumulan (824 Saka). Relief *Karmawibhangga* (Lihat Gambar 1) pada bagian kanan menggambarkan orang yang sedang memikul barang melintas di depan kuil. Pada bagian kiri digambarkan seorang laki-laki yang sedang duduk dan dilayani oleh pelayan (Krom, 1927 dalam Arrazaq dan Rochmad, 2020). Berdasarkan data prasasti disebutkan adanya aktivitas ekonomi atau perdagangan. Cara berdagang dapat diketahui berdasarkan relief. Berdasarkan relief tersebut digambarkan orang yang memikul. Memikul merupakan salah satu cara menjajakan dagangan yang dilakukan oleh masyarakat Kerajaan Mataram Kuno.

Gambar 1. Relief *Karmawibhangga* dengan kode O.27.



Sumber: Arsip Balai Konservasi Borobudur (Arrazaq dan Rochmad, 2020)

JEJAK AKUNTANSI DI PULAU JAWA: HISTORIOGRAFI MASA KEJAYAAN KERAJAAN MATARAM KUNO DAN KERAJAAN MATARAM ISLAM

Komoditas perdagangan pada masa Kerajaan Mataram Kuno dapat diketahui berdasarkan prasasti. Salah satu komoditas perdagangan yang disebutkan dalam Prasasti Canggal ialah beras. Relief *Karmawibhangga* menggambarkan ladang padi yang terdiri atas berbagai biji-bijian (lihat Gambar 2). Tanaman di ladang tersebut dimakan oleh banyak tikus. Pada bagian kiri relief digambarkan bangunan lumbung yang digunakan untuk menyimpan hasil panen. Di bawah lumbung terdapat dua orang yang sedang duduk dan di bawahnya terdapat anjing penjaga (Krom, 1927 dalam Arrazaq dan Rochmad, 2020).

Gambar 2. Relief *Karmawibhangga* dengan kode O.26.



Sumber: Arsip Balai Konservasi Borobudur (Arrazaq dan Rochmad, 2020)

Komoditas yang diperdagangkan oleh pemerintah dikenai pajak. Di samping pajak hasil bumi dan pajak tanah, rakyat pun harus membayar pajak perdagangan dan pajak usaha kerajinan. Pajak yang dikenakan kepada para pedagang dan pengrajin dalam prasasti disebutkan batasan jumlah barang-barang yang diproduksi dan yang diperdagangkan. Barang dagangan lebih dari yang ditentukan maka sisanya itu dikenai pajak (Lutfillah dan Sukoharsono, 2013). Pajak perdagangan dipungut oleh pejabat pemerintah yang bertugas mengurus pajak.

Lebih lanjut Lutfillah dan Sukoharsono (2013) menjelaskan bahwa mekanisme perpajakan masa Mataram Kuno yang bersifat vertikal, di mana Raja melimpahkan wewenangnya pada petugas pajak menunjukkan kekuasaan yang bertingkat. Pajak yang berasal dari rakyat dipungut dan dikumpulkan oleh para *rama*, sebagai penguasa *wanua* dan pajak yang didapat dialokasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Banyaknya aktivitas yang dikenai pajak dan peraturan lain yang menyertainya, misalnya ketentuan

mengenai kriteria dan besaran pungutan pajak, serta pengaturan waktu pemungutan pajak untuk semua jenis pajak menunjukkan bahwa Raja selaku penguasa tertinggi dan para pejabatnya tidak berarti apa-apa tanpa rakyatnya. Melalui perpajakan yang ditetapkan oleh Kerajaan memiliki makna bahwa Kekuasaan yang sebenarnya terletak pada pengayoman yang Maha Tinggi. Segala kehebatan raja tidak akan berarti bagi diri dan rakyatnya jika tidak menempatkan diri di bawah perlindungan yang maha kuasa. Hal ini dibuktikan hasil pungutan pajak dialokasikan untuk pemeliharaan dan melestarikan bangunan suci. Aktivitas pemungutan pajak menjalin hubungan sosial antara pemerintah dengan wajib pajak secara berkesinambungan.

Aktivitas perdagangan membutuhkan alat pertukaran berupa uang. Prasasti-prasasti menyebutkan istilah-istilah untuk alat pembayaran yang terdiri atas mata uang emas, yaitu *suwarna*, *masa*, dan *kupang*. Sedangkan mata uang perak dengan satuan *dharana*, *masa*, dan *kupang* (Suwardono, 2013). Keberadaan alat tukar mengindikasikan bahwa Kerajaan Mataram Kuno sudah memiliki mata uang yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Bentuknya bervariasi ada yang bulat, persegi, dan bulat dengan lubang di tengah yang berfungsi untuk mengikat mata uang tersebut. Uang tersebut digunakan oleh masyarakat sebagai alat tukar.

Jejak Akuntansi Era Kejayaan Kerajaan Mataram Islam (1575-1755 M)

Kerajaan Mataram Islam khususnya pada masa pemerintahan Sultan Agung (1613-1645 M), merupakan salah satu periode penting dalam sejarah Indonesia. Sultan Agung, yang merupakan raja kedua Mataram, dikenal karena kekuatan otoritas dan kebijakannya dalam mengelola tanah dan sumber daya di seluruh kekuasaannya. Memahami struktur agaria di Kerajaan Mataram sangat penting karena Sultan Agung membagi wilayah kekuasaannya menjadi beberapa lingkaran konsentris, termasuk Negara Agung, Mancanegara, dan Pasisiran, dengan tujuan meningkatkan kedisiplinan dan pemanfaatan tanah di daerah tersebut. Tiga jenis tanah yang dikelola adalah tanah narawita, tanah penghabisan, dan tanah sawah, yang mencerminkan perhatian Sultan Agung terhadap pertanian dan ekonomi rakyatnya (Munawar, 2021). Secara keseluruhan, kerajaan Mataram di bawah kepemimpinan Sultan Agung merupakan contoh yang penting dalam memahami konsep otoritas politik dan ekonomi di Indonesia pada masa itu. Kebijakan-kebijakan yang diambil serta warisan yang ditinggalkan memberikan

JEJAK AKUNTANSI DI PULAU JAWA: HISTORIOGRAFI MASA KEJAYAAN KERAJAAN MATARAM KUNO DAN KERAJAAN MATARAM ISLAM

kontribusi besar terhadap perkembangan sejarah dan politik Nusantara (Susilo, 2020; Munawar, 2021).

Jika ditinjau dari letak geografisnya, Kerajaan Mataram Islam ada di pedalaman serta mempunyai tanah yang subur. Hal ini membuatnya menjadi daerah agraris (pertanian) yang cukup berkembang, bahkan menjadi daerah pengekspor beras paling besar waktu itu. Selain itu rakyat Kerajaan Mataram Islam pun banyak menjalankan kegiatan perdagangan hasil laut. Hal tersebut bisa diketahui dari didapatkannya kekuasaan atas beberapa daerah pelabuhan di sepanjang pantai Utara Jawa. Perpaduan 2 unsur ekonomi, yakni maritim dan agraris dapat membuat Kerajaan Mataram Islam kuat dalam percaturan politik di nusantara. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk di era Kerajaan Islam berprofesi sebagai petani. Selain pertanian, perdagangan juga menjadi sektor penting yang mendukung pemenuhan kebutuhan sandang pangan penduduk di Kerajaan Mataram Islam. Kegiatan perdagangan dilakukan baik dalam skala kecil maupun skala besar.

Puncak kejayaan Mataram Islam pada masa pemerintahan Sultan Agung (1613-1645) terlihat penyatuan kerajaan Islam di pesisir Jawa tidak hanya menambah kekuatan politik, namun juga kekuatan ekonomi, sehingga ekonomi Mataram bukan hanya bergantung pada ekonomi agraris, namun juga dikarenakan perdagangan dan pelayaran (Ulfa, 2022). Temuan komponen yang dapat menginterpretasikan akuntansi pada masa Kerajaan Mataram Islam yaitu terdiri dari mekanisme pajak, pasar, penggunaan uang dan pertukaran (transaksi) terlihat dari sumber-sumber literatur tentang Kerajaan Mataram Islam (Ulfa, 2022).

Hasil pertanian terbesar di wilayah Kerajaan Mataram Islam adalah padi. Pajak hasil bumi berupa padi diserahkan penduduk kepada pemegang *lungguh* berdasarkan hasil padi setiap tahunnya. Ketentuannya yaitu jika dibayar dengan pajak, 1 *bahu* hasil padi disamakan dengan 1 *real* Spanyol. Ukuran luas tanah yang dipergunakan untuk menentukan jumlah hasil bumi atau besarnya pajak yang harus diserahkan kepada pemegang *lungguh* ialah *jung*. Setiap *jung* terdiri dari 5 *bahu* (Moertono, 1985). Secara resmi, 1 *jung* terdiri atas 4 *bahu*, sebab yang *sebauh* diberi-pinjamkan kepada *bekel* sebagai imbalan tugas jabatannya tanpa dibebani pemungutan atau pajak. Jadi, yang

dibebani pemungutan-wajib atau pajak hanya *4 bahu*, yaitu tanah yang dikerjakan oleh petani. Tanah pertanian yang *4 bahu* tersebut diusahakan dengan hasil *maro*, yaitu setengah hasil untuk pemegang *palungguh* dan setengah hasil lainnya untuk penduduk petani yang mengerjakan (Hatmosuprobo, 1980).

Tabel 1. Daftar Pembagian Hasil Bumi Berupa Padi dalam Hitungan *Jung*

Daftar Penerima	Jumlah
Penduduk/Petani	40 %
<i>Bekel</i>	20%
<i>Demang/ngabehi</i>	8%
Bupati	8%
Keraton	24%

Sumber: Munawar (2020)

Berdasarkan pembagian hasil bumi pada Tabel 1, meskipun bagian yang diterima oleh keraton dan para pegawai rendahan lebih kecil daripada hasil yang diterima petani, tetapi karena membawahi banyak *patuh* dengan tanah *lungguh*-nya, maka hasil yang dikumpulkan dari pajak tersebut akhirnya menjadi banyak. Perbendaharaan Kerajaan Mataram Islam menjadi kaya akibat pajak tanah yang masuk dari wilayah-wilayah kekuasaannya (Suratmin, 1982). Selain pembagian hasil padi tersebut, ada pula pembagian hasil bumi lainnya, seperti palawija. Untuk tanaman palawija bagi hasilnya *mertelu*, artinya pemegang *palungguh* 1/3 dan penduduk-petani 2/3 (Hatmosuprobo, 1980).

Saat Sultan Agung menjadi raja, dibentuklah pegawai *wedana gedong tengen* maupun *wedana gedong kiwa* yang menangani perbendaharaan atau keuangan Kerajaan (Moedjanto, 1987). Wedana itu mengelola semua pemasukan yang menjadi kas kerajaan, maka bisa dianggap bahwasanya pada pusat Kerajaan Mataram Islam telah ada organisasi ataupun lembaga pada bidang keuangan. Namun, lembaga tersebut belum digunakan menjadi alat utama perekonomian kerajaan, dikarenakan untuk raja kekayaan hanya untuk ditimbun maka tidak pernah dikatakan menjadi alat efisiensi pada lembaga perekonomian kerajaan. Dengan adanya lembaga itu, Sultan Agung sudah mengusahakan supaya pemasukan kas kerajaan bisa dikendalikan secara baik.

Di bawah *wedana gedong tengen* beserta *wedana gedong kiwa*, ada jabatan keuangan yang dibuat sesuai dengan tugas yang diterima. Antara lain *meladang*,

JEJAK AKUNTANSI DI PULAU JAWA: HISTORIOGRAFI MASA KEJAYAAN KERAJAAN MATARAM KUNO DAN KERAJAAN MATARAM ISLAM

pemaosan, serta *ketandan*. Tugas mereka adalah sebagai pengumpul pajak tanah, pemungut hasil bumi yang biasanya berupa padi, palawija dan hasil pertanian lainnya, serta pengurus pajak keuangan. sewaktu pemerintahan Sultan Agung, pajak yang dipungut dari rakyat tiap tahunnya senantiasa sampai ke pemerintah pusat (Suratmin and dkk, 1982). *Wedana gedong tengen* maupun *wedana gedong kiwa* yang didirikan Sultan Agung fungsinya hanya sebatas menjadi penghimpun aset yang masuk ke kas kerajaan. Untuk mengelola keuangan kerajaan, pegawai itu tidak mencatat secara keseluruhan terkait dengan pemasukan dan pengeluaran kerajaan. Hal tersebut pun terkait dengan pemenuhan kebutuhan kerajaan yang tidak menentu tiap waktunya.

Menurut Munawar (2020), pengelolaan pajak di Kerajaan Mataram Islam pada masa Sultan Agung dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, mengatur birokrasi kepengurusan pajak yang didasarkan pada sistem perwilayahannya, yaitu mencakup wilayah *kutagara*, *negara agung*, *mancanegara*, dan *pasisiran*. Di pusat kerajaan, pengelolaan pajak diawasi oleh raja secara langsung. Di wilayah *negara agung*, pajak dikelola oleh para pejabat dari tingkat *bekel*, *demang*, bupati, *wedana*, hingga patih. Di wilayah *mancanegara*, pajak dikelola oleh para Tumenggung. Adapun di wilayah *pasisiran*, pajak dikelola oleh para Syahbandar. Kedua, menentukan jenis dan besaran pajak yang harus diserahkan kepada kerajaan, seperti pajak penduduk, pajak tanah, pajak upeti, dan pajak bea cukai barang dan jasa. Ketiga, membentuk lembaga keuangan kerajaan, yaitu *wedana gedung kiwa* dan *wedana gedung tengen* untuk mengurus pemasukan kerajaan. Keempat, mengatur arus distribusi kekayaan kerajaan, yaitu untuk menggaji para pekerja istana, memberi modal usaha kepada para petani, mendukung peperangan, dan membeli barang-barang kebutuhan istana seperti kain katun, sutera, porselin, rotan, permata, dan barang-barang kebutuhan istana lainnya.

Selama masa Pemerintahan Sultan Agung, ekonomi merupakan salah satu aspek penting untuk tetap mempertahankan keutuhan Kerajaan Mataram Islam. Wawasan ekonomi pertanian atau agraris menjadi sumber utama pendapatan negara. Ketika itu, penguasaan tanah dengan memperluas wilayah kekuasaan sangatlah penting, bahkan menjadi suatu hal yang mutlak dilakukan dengan dasar dua unsur kepentingan, yaitu kepentingan politik dan ekonomi. Menurut Ulfa (2022), kijakan ekonomi yang dilakukan

oleh Sultan Agung untuk menstabilkan perekonomian Kerajaan Mataram Islam terdiri dari tiga macam, yaitu kebijakan pertanian, fiskal, dan moneter. Dalam kebijakan pertanian, Sultan Agung mengawalinya dengan mendistribusikan tanah kepada para bangsawan dan pejabat tinggi kerajaan untuk kemudian diserahkan kepada para petani sebagai orang yang diperintah dalam menggarap tanah-tanah yang ada. Untuk meningkatkan pertanian, maka dibentuklah forum komunikasi sebagai wadah pembinaan bagi para petani, membangun bendungan air beserta saluran-saluran airnya, mengoptimalkan produksi beras dengan langkah intensifikasi tanaman padi dan pemberian modal, serta menetapkan pajak dalam pertanian. Kebijakan fiskal yang dilakukan Sultan Agung adalah membentuk petugas pajak dan menentukan kepada siapa, serta jenis maupun besaran pajaknya. Adapun kebijakan moneternya adalah membentuk lembaga keuangan. Tujuannya untuk mempermudah dalam mengontrol pemasukan kas kerajaan.

KESIMPULAN

Kerajaan Mataram Kuno maupun Kerajaan Mataram Islam sama-sama pernah mengalami puncak kejayaan, yang mana kejayaannya juga tercermin dalam kekuatan ekonomi, sosial dan politik dari kedua Kerajaan tersebut. Sektor pertanian menjadi penyokong utama perekonomian Kerajaan Mataram Kuno dan Kerajaan Mataram Islam. Komoditas utama dalam sektor pertanian tersebut adalah padi/beras. Bahkan pada masa Kerajaan Islam menjadi daerah pengekspor beras paling besar waktu itu. Selain itu rakyat Kerajaan Mataram Islam pun banyak menjalankan kegiatan perdagangan hasil laut. Hal ini dikarenakan ekspansi wilayah pada masa Kerajaan Mataram Islam yang semakin meluas hingga luar pulau Jawa maupun mancanegara. Mayoritas penduduk di masa Kerajaan Mataram Kuno dan Kerajaan Mataram Islam berprofesi sebagai petani, selain itu sebagian juga berprofesi sebagai pedagang. Komoditas yang diperdagangkan dikenai pajak oleh pemerintah kerajaan. Aktivitas perdagangan membutuhkan alat pertukaran berupa uang. Keberadaan alat tukar mengindikasikan bahwa pada masa Kerajaan Mataram Kuno maupun Kerajaan Mataram Islam sudah memiliki mata uang yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Uang tersebut digunakan oleh masyarakat sebagai alat tukar.

JEJAK AKUNTANSI DI PULAU JAWA: HISTORIOGRAFI MASA KEJAYAAN KERAJAAN MATARAM KUNO DAN KERAJAAN MATARAM ISLAM

Pada masa Kerajaan Mataram Kuno sudah diterapkan pajak hasil bumi dan pajak tanah, selain itu rakyat pun harus membayar pajak perdagangan dan pajak usaha kerajinan. Pajak perdagangan dipungut oleh pejabat pemerintah yang bertugas mengurusi pajak. Pajak yang berasal dari rakyat dipungut dan dikumpulkan oleh para *rama*. Temuan komponen yang dapat menginterpretasikan akuntansi pada masa Kerajaan Mataram Islam yaitu terdiri dari mekanisme pajak, pasar, penggunaan uang dan pertukaran (transaksi). Pengelolaan pajak di Kerajaan Mataram Islam dengan cara mengatur birokrasi kepengurusan pajak yang didasarkan pada sistem perwilayahannya dan menentukan jenis dan besaran pajak yang harus diserahkan kepada Kerajaan. Pajak yang diberlakukan pada masa Kerajaan Mataram Islam seperti pajak penduduk, pajak hasil bumi, pajak tanah, pajak upeti, dan pajak bea cukai barang dan jasa. Kerajaan Mataram Islam juga sudah dibentuk lembaga keuangan kerajaan, yaitu *wedana gedung kiwa* dan *wedana gedung tengen* untuk mengurusi pemasukan kerajaan.

DAFTAR REFERENSI

Alferjani, M., Mirshekary, S., Dellaportas, S., Mihret, D., & Yaftian, A. (2018). Development of accounting regulatory institutions in libya (1951-2006). Accounting Research Journal, 31(2), 267-283. <https://doi.org/10.1108/arj-01-2015-0007>

Arrazaq, Naufal Raffi & Rochmat, Saefur. (2020). Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kerajaan Mataram Kuno Abad IX-X M: Kajian Berdasarkan Prasasti dan Relief. *Patrawidya*, Vol. 21, No. 2.

Budiasih, I., E.G. Sukoharsono, Rosidi, dan A.D. Mulawarman. 2012. *Kontruksi Praktik Akuntansi Pada Masa Pemerintahan Raja Udayana Di Bali : Pendekatan Etnoarkeologi*. (Ph.D), Universitas Brawijaya Malang.

Carnegie, G. (2014). The present and future of accounting history. Accounting Auditing & Accountability Journal, 27(8), 1241-1249. <https://doi.org/10.1108/aaaj-05-2014-1715>

Carnegie, G. and Napier, C. (2012). Accounting's past, present and future: the unifying power of history. Accounting Auditing & Accountability Journal, 25(2), 328-369. <https://doi.org/10.1108/09513571211198782>

Hatmosuprobo, Suharjo. (1980). *Palungguh Pada Jaman Kerajaan Mataram*. Yogyakarta: Pembinaan Pengajaran Sejarah IKIP Sanata Dharma.

Kuntowijoyo (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Lutfillah, N. (2014). Akuntansi dalam penetapan sima masa jawa kuno. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(2). <https://doi.org/10.18202/jamal.2014.08.5018>

Lutfillah, N. Q., Sukoharsono, E. G. (2013). "Historiografi Akuntansi Indonesia Masa Mataram Kuno (Abad VII-XI Masehi). *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*.Volume 4. Nomor 1.

Moedjanto, G. *Konsep Kekuasaan Jawa: Penerapannya Oleh Raja-Raja Mataram*. Yogyakarta: Kanisius, 1987

Moertono, Soemarsaid. (1985). *Negara dan Usaha Bina-Negara: Studi tentang Mataram II, Abad XVI sampai XIX*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Munawar, Z. (2021). Tanah, otoritas politik, dan stabilitas ekonomi kerajaan mataram islam (1613-1645 m). *Diakronika*, 21(1), 1-13. <https://doi.org/10.24036/diakronika/vol21-iss1/163>

JEJAK AKUNTANSI DI PULAU JAWA: HISTORIOGRAFI MASA KEJAYAAN KERAJAAN MATARAM KUNO DAN KERAJAAN MATARAM ISLAM

Munawar, Zaid. (2020). Pengelolaan Pajak di Kerajaan Mataram Islam Masa Sultan Agung, 1613-1645. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 4(1), 10-23.

Napier, C. (2022). How theorising can enhance historical accounting research. *Accounting and Management Review | Revista De Contabilidade E Gestão*, 26(1). <https://doi.org/10.55486/amrrcg.v26i.6a>

Nawangsari, A. and Hanun, N. (2020). Perkembangan penelitian sejarah akuntansi di indonesia dalam bingkai perspektif nah. *Journal of Accounting Science*, 4(2), 57-69. <https://doi.org/10.21070/jas.v4i2.894>

Oemar, M., dkk. (1994). *Sejarah Daerah Jawa Tengah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Poesponegoro, Marwati Djoened dan Notosusanto, Nugroho (Eds). (2008). *Sejarah Nasional Indonesia II: Zaman Kuno*. Jakarta: Balai Pustaka.

Sjamsuddin, H. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak

Sukoharsono, E. G., dan Lutfillah, N. 2008. *Accounting In The Golden Age Of Singosari Kingdom: A Foucauldian Perspective*. Paper presented at the Simposium Nasional Akuntansi XI, Pontianak

Suratmin, and dkk. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme Dan Kolonialisme Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1982.

Susanti, N. (2010). *Airlangga: Biografi Raja Pembaru Jawa Abad XI*. Depok: Komunitas Bambu.

Susilo, A. (2020). Sultan agung hanyakrakusuma dan eksistensi kesultanan mataram. *Diakronika*, 20(2), 114. <https://doi.org/10.24036/diakronika/vol20-iss2/133>

Suwardono (2013). *Sejarah Indonesia Masa Hindu-Buddha*. Yogyakarta: Ombak.

Ulfa, Alif. (2023). Historiografi Akuntansi Pada Masa Kerajaan Mataram Islam (1575-1755 M) Dalam Paradigma *New Accounting History* dan Relevansinya Dengan Akuntansi Dalam Islam. Tesis. Repozitori IAIN Kudus

Zoetmulder, P.J. (1994). *Kamus Jawa Kuna-Indonesia*. Jakarta: Gramedia.